



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2018

KEMENHUB. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. ORTA.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah disusun dan ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/627/M.KT.01/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 1331);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal I

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688); dan
- b. Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(4) Satpel BU baru di luar Lampiran Peraturan Menteri ini menjadi satuan pelaksana dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara terdekat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah Unit Penyelenggara Bandar Udara sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdiri atas:

- a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
- b. 11 (sebelas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
- c. 23 (dua puluh tiga) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan

- d. 118 (seratus delapan belas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
 - (2) Satuan Pelayanan Bandar Udara sebanyak 21 (dua puluh satu) Satpel BU.
3. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT
 PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Propinsi Aceh				
1.	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya	II	
2.	Maimun Saleh	Sabang	III	
3.	Lasikin	Sinabang	III	
4.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
5.	Rembele	Takengon	III	
	Blangkajeren	Gayo Lues	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
	Alas Leuser	Kutacane	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
Prop. Sumatera Utara				
6.	Binaka	Gunung Sitoli	III	
7.	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
8.	FL Tobing	Sibolga	III	Pinangsori (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Sibisa	Parapat	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU FL Tobing
9.	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	
Prop. Sumatera Barat				
10.	Rokot	Sipora	III	
Prop. Kepulauan Riau				
11.	Dabo	Singkep	III	
	Letung	Anambas	Sapel BU	Pelayanan Kantor UPBU Dabo
12.	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	Sei Bati (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
13.	Ranai	Natuna	III	
Prop. Riau				
14.	Japura	Rengat	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
15.	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	III	
Prop. Jambi				
16.	Dépati Parbo	Kerinci	III	
17.	Muara Bungo	Rimbo Bujang	III	
Prop. Bengkulu				
18.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	
19.	Muko-muko	Muko-muko	III	
	Enggano	Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Muko-muko
20.	Silampari	Lubuk Linggau	III	
	Muhammad Taufik Kiemas	Pesisir Barat, Lampung	Satpel BU	Pekonserai (nama bandar udara lama berdasar PM 40/2014), Pelayanan Kantor UPBU Silampari
Prop. Bangka Belitung				
21.	H. AS. Hanandjoeddin	Tanjung Pandan	I	
Prop. Lampung				
22.	Radin Inten II	Lampung Selatan	I	
Prop. Jawa Barat				
23.	Cakrabhuana	Cirebon	III	Penggung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Jawa Tengah				
24.	Tunggul Wulung	Cilacap	III	
25.	Dewa Daru	Karimun Jawa	III	
Prop. Jawa Timur				
26.	Banyuwangi	Banyuwangi	III	Blimbingsari (nama bandar udara lama berdasar KM 40/2014)
27.	Trunojoyo	Sumenep	III	
	Harun Thohir	Gresik	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Trunojoyo
Prop. Nusa Tenggara Barat				
28.	Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	II	
29.	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa	III	Brangbiji (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Nusa Tenggara Timur				
30.	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere	II	Wai Oti (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
31.	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	II	Mau Hau (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
32.	Komodo	Labuhan Bajo	II	
33.	H. Hasan Aroeboesman	Ende	II	
34.	Frans Sales Lega	Ruteng	III	Satar Tacik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
35.	Tambolaka	Waikabubak	II	
36.	A.A Bere Tallo	Atambua	III	Haliwen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
37.	Mali	Alor	III	
38.	Gewayantana	Larantuka	III	
39.	David Constantijn Saudale	Rote Ndao	III	Lekunik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
40.	Tardamu	Sabu	III	
41.	Soa	Bajawa	III	
42.	Wonopito	Lewoleba	III	
Prop. Kalimantan Barat				
43.	Rahadi Oesman	Ketapang	II	
44.	Susilo	Sintang	III	
45.	Pangsuma	Putusibau	II	
46.	Nangapinoh	Nangapinoh	III	
Prop. Kalimantan Tengah				
47.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	I	
48.	Iskandar	Pangkalan Bun	II	
49.	H. Asan	Sampit	II	
50.	Sunggu	Buntok	III	
51.	Beringin	Muara Teweh	III	
52.	Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	III	
53.	Tumbang Samba	Tumbang Samba	III	
54.	Kuala Kurun	Kuala Kurun	III	
Prop. Kalimantan Selatan				
55.	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	II	Stagen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Prop. Kalimantan Timur				
56.	Temindung	Samarinda	II	
	Maratua	Berau	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Temindung
57.	Melak	Sendawar	III	
58.	Kalimarau	Tanjung Redep	I	
59.	Datah Dawai	Datah Dawai	III	
Prop. Kalimantan Utara				
60.	Juwata	Tarakan	I Utama	
61.	Seluwing	Malinau	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
62.	Nunukan	Nunukan	III	
63.	Yuvai Semaring	Long Bawan	III	
64.	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	III	
65.	Long Apung	Long Apung	III	
Prop. Sulawesi Utara				
66.	Naha	Tahuna	III	
67.	Melongguane	Sangihe Talaud	III	
	Miangas	Kepulauan Talaud	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Melongguane
Prop. Gorontalo				
68.	Djalaluddin	Gorontalo	I	
Prop. Sulawesi Tengah				
69.	Mutiara Sis-AI Jufri	Palu	I	Mutiara (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
70.	Pogogul	Buol	III	
71.	Syukurin Aminudin Amir	Luwuk	II	Bubung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
72.	Tojo Una Una	Tojo Una Una	III	
73.	Sultan Bantilan	Tolo-toli	III	Lalos (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
74.	Kasiguncu	Poso	II	
	Morowali	Morowali	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kasiguncu
Prop. Sulawesi Barat				
75.	Tampa Padang	Mamuju	II	
	Sumarorong	Mamasa	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tampa Padang
Prop. Sulawesi Selatan				
76.	Pongtiku	Makale	III	
77.	H. Aroepala	Pulau Selayar	III	
78.	Andi Jemma	Masamba	III	
79.	Bone	Bone	III	
80.	Seko	Seko	III	
81.	Rampi	Rampi	III	
82.	Bua	Luwu	III	
Prop. Sulawesi Tenggara				
83.	Haluoleo	Kendari	I	Wolter Monginsidi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
84.	Matahora	Wakatobi	III	
85.	Sangia Ni Bandera	Kolaka	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
86.	Beto Ambari	Bau-bau	III	
87.	Sugimanuru	Muna	III	
Prop. Maluku Utara				
88.	Sultan Babullah	Ternate	II	
	Gebe	Pulau Gebe	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Sultan Babullah
89.	Emalamo	Sanana	III	
90.	Buli	Maba	III	
91.	Kuabang	Kao	III	
92.	Gamar Malamo	Galela	III	
93.	Oesman Sadik	Labuha	III	
94.	Pitu	Morotai	III	
Prop. Maluku				
95.	Karel Sadsuitubun	Langgur	II	Ibra (nama bandar udara lama berdasar KM 40/2014)
96.	John Becker	Pulau Kisar	III	
	Moa	Maluku Tenggara	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU John Becker
97.	Larat	Pulau Larat	III	
98.	Dobo	Pulau Aru	III	
99.	Mathilda Batlayeri	Maluku Tenggara Barat	III	Olilit (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
100	Bandaneira	Pulau Banda	III	
	Kuffar	Seram Bagian Timur	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
101	Namlea	Pulau Buru	III	
102	Namrole	Pulau Buru	III	
103	Amahai	Pulau Seram	III	
104	Wahai	Pulau Seram	III	
Prop. Papua				
105	Sentani	Jayapura	I Utama	
106	Dabra	Mamberamo Raya	III	
107	Mopah	Merauke	I	
	Senggo	Mappi	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mopah
108	Kamur	Asmat	III	
109	Kimam	Merauke	III	
110	Bomakia	Boven Digoel	III	
111	Senggeh	Keerom	III	
112	Wamena	Jayawijaya	I	
113	Elelim	Yalimo	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
114	Douw Aturure	Nabire	II	Nabire (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
115	Bilorai	Intan Jaya	III	
116	Enarotali	Paniai	III	
117	Waghete	Deiyai	III	
118	Mararena	Sarmi	III	
119	Tanah Merah	Boven Digoel	III	
	Manggalum	Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tanah Merah
	Korowai Batu	Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tanah Merah
120	Mulia	Puncak Jaya	III	
121	Sudjarwo Tjondronegoro	Serui	III	
122	Oksibil	Pegunungan Bintang	III	
123	Kiwirok	Pegunungan Bintang	III	
124	Moanamani	Nabire	III	
125	Mindiptanah	Boven Digoel	III	
126	Kepi	Mappi	III	
127	Kokonao	Mimika	III	
128	Akimuga	Mimika	III	
129	Mozes Kilangin	Mimika	II	
130	Bokondini	Jayawijaya	III	
131	Okaba	Merauke	III	
132	Numfoor	Biak Numfoor	III	
133	Illaga	Puncak	III	
	Sinak	Puncak Jaya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Illaga
134	Ilh	Puncak Jaya	III	
135	Tiom	Lanny Jaya	III	
136	Ewer	Asmat	III	
137	Batom	Pegunungan Bintang	III	
138	Bade	Mappi	III	
139	Karubaga	Tolikara	III	
140	Nop Goliat Dekai	Yahukimo	II	
	Sobaham	Yahukimo	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Nop Goliat Dekai
Prop. Papua Barat				
141	Rendani	Manokwari	II	
142	Domine Eduard Osok	Sorong	I	
	Segun	Sorong	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok
	Werur	Manokwari	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Domine Eduard Osok

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
143	Marinda	Waisai	III	
144	Torea	Fak-fak	III	
145	Bintuni	Teluk Bintuni	III	
146	Utarom	Kaimana	III	
147	Merdey	Manokwari	III	Ijababra (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
148	Wasior	Teluk Womdana	III	
149	Inanwatan	Sorong Selatan	III	
150	Teminabuan	Sorong Selatan	III	
151	Babo	Teluk Bintuni	III	
152	Kambuaya	Manokwari	III	
153	Kebar	Manokwari	III	
154	Ayawasi	Sorong Selatan	III	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI